

EVOLUSI JAWARA DI BANTEN (STUDI EVOLUSI DARI BANDIT MENJADI PEJABAT)

Bandiyah

Dosen Ilmu Politik Universitas Brawijaya
Jl. Veteran Malang, E-mail: dyah_3982@yahoo.com

ABSTRACT

Jawara used to a 'santri' (student at traditional Muslim school), an apprentice of a 'kiayi' (teacher of Islam) who had supernatural and divine power, who fought against the colonial in Banten. Furthermore, they also became bandit because of their bad behavior in which they brought about criminal and violence to the society around them. Later on, they became the sub-culturalism which grow in Banten. Unfortunately, this situation was benefited by Golkar (Labor Class) Party as the mass mobilize machine for the sake of New Order Regime. In the other hand, it gave advantage toward Jawara to experience political realm there so that they could absolutely access entire local sources with their great attempts. When there was the Reformation Era, followed by policies about decentralization and local autonomy which made Banten became new province, it automatically gave opportunity to Jawara having role more active and unhampered in local government of Banten. Having possessed significant role in the Banten province establishment, Jawara recently owns crucial role local government bureaucracy by being a number one person as a governor there.

This study is done to reveal "*How did Jawara evolve from being a bandit into local official and control Banten Governance?*" To answer such a question, the researcher implements theoretical framework that is theory of social alteration and jawara's evolution. Moreover, the researcher employs qualitative method by historic descriptive approach as the research methodology. The method of data collecting is interview technique, documentation study, monitoring, and observation.

The findings of this research reveal that Jawara carry out evolution through 2 factors. The *first* is that the actors (Jawara) change in which they have an ability to do various things, i.e. acceleration in building Jawara interrelation, acceleration through organization training, acceleration in individual competition, heading toward culture and belief principles, participation in Banten Province establishment, and using violence as power instrument. The *second* is the emergence of structural alteration. This change gives greater opportunity to penetrate into the society and local government so that they can access their power in candidacy as a Vice Governor of Banten at 2001 and afford to consolidate local politic there that ultimately became Governor of Banten in the period of 2006 until 2011. However, this structural alteration succeeds to be a supporter in evaluation process of Jawara. Indeed, the actors ability have definitely the one which can consolidate back his role in Banten. The second of factors interact become power of informality government Jawara, that work in illegal structure expression *shadow state*.

Key words: Jawara, social Evolution, aktor alteration, Structural Change

PENDAHULUAN

Studi ini bertolak dari analisis mengenai definisi Jawara yang dikemukakan oleh Sartono Kartodirdjo dan Tihami. Sartono mendefinisikan Jawara sebagai kelompok sosial masyarakat yang disebut sebagai bandit sosial yang seringkali melakukan tindakan kriminal, mengambil hak orang lain dengan sering menggunakan kekerasan.¹ Sedangkan Tihami mendefinisikan Jawara sebagai seseorang yang dekat dengan kiayi karena selain sebagai muridnya kiayi, ia juga memiliki ilmu-ilmu kesaktian dan menguasai ilmu persilatan.² Dari definisi-definisi yang dikemukakan oleh kedua pakar sejarah yang pernah meneliti tentang Jawara di Banten tersebut di atas tidak sepenuhnya benar sebab realitas Jawara saat ini mengalami perubahan yang revolusioner, sedangkan definisi tersebut dirumuskan dalam konteks waktu yang berbeda.

Pada penelitian ini menunjukkan bahwa Jawara tidak lagi diartikan sebagai bandit social ataupun santri tetapi telah mengalami perubahan besar. Namun demikian, nilai-nilai kejawaraan mereka dahulu masih melekat dalam wujud dzatnya, yang membedakan Jawara sekarang ini adalah bentuk manifestasinya. Pada kajian ini, Jawara dimaknai sebagai individu maupun kolektivitas kultural yang mempunyai struktur jaringan organisasi yang berbasis pada kekeluargaan, keturunan, ilmu silat dan kanuragan, spiritual, kekerasan dan kemampuan dalam mengelola ekonomi, bisnis dan budaya sehingga berpotensi untuk melakukan penetrasi social maupun politik terhadap anggota masyarakat lainnya serta institusi pemerintahan itu sendiri.³

Dalam sejarahnya Jawara juga pernah menjadi salah satu kekuatan signifikan baik dalam melindungi masyarakat Banten dari jajahan kolonialisme juga menjadi pemimpin desa, penjaga keamanan desa, maupun menjadi guru silat dan guru ilmu magis.⁴ Dalam perkembangan kekinian jawara telah mengalami pergeseran makna, peran, dan perubahan bentuk sosial yakni tidak sekedar sebagai organisasi yang berbasis kekerasan dengan simbol-simbol yang ditonjolkan seperti magis dan jimat, akan tetapi lebih jauh mereka telah memegang peranan dan jabatan penting di dalam birokrasi pemerintahan daerah juga dalam penguasaan ekonomi dan bisnis di Banten. Peran jawara dalam kehidupan sosial politik di atas ternyata membawa implikasi pada kehidupan birokrasi dan pengelolaan pemerintahan daerah saat ini. Kelompok yang dengan mudah memobilisasi massa ini telah mendapatkan pengaruh kuat dalam pengambilan keputusan, termasuk juga dalam penentuan proyek-proyek pemerintahan daerah. Mereka juga memasuki arena pemerintahan dan menjadi bagian dari pemerintahan daerah, karena telah menduduki jabatan-jabatan strategis seperti gubernur, bupati, walikota, kepala dinas dan lain sebagainya. Kemampuannya dalam mengelola sumber legitimasi yang bersumber dari kultur, kedekatannya dengan kekuasaan dan ekonomi menjadikan mereka berhasil mengkooptasikan otoritas tersebut untuk melakukan pelibatan politik baik di wilayah negara (pemerintahan daerah) maupun swasta. Kini mereka

¹ Sartono Kartodirdjo, *Pemberontakan Petani Banten 1888*, (Pustaka Jaya, Jakarta; 1988). Dalam bukunya, Sartono mendefinisikan jawara (jago) dalam bingkai tindakan dan sikap pemberontakan petani di kota Cilegon.

² Tihami "*Kiai dan Jawara di Banten*" (Tesis Master, Universitas Indonesia, Jakarta, 1992). Adapun definisi jawara yang diungkapkan oleh Tihami melihat hubungan kiayi dengan jawara di desa pesanggrahan Serang Banten.

³ Definisi ini telah diolah dari berbagai makna, dan data-data hasil penelitian penulis

⁴ Hudari, Atu Karomah, Sholahudin Al-Ayubi, "*Tasbih dan Golok; Studi tentang Peran, Kedudukan dan Jaringan Kiai dan Jawara di Banten*", Laporan Penelitian Kompetitif (IAIN Sultan Maulana Hasanudin, Serang). hal 92, 95,

berkembang menjadi kekuatan *'invisible'* namun real dalam kehidupan di pemerintahan Banten. Para jawara yang sudah terintegrasi dengan negara tersebut bekerja bersama-sama dengan negara namun mereka tetap membawa institusi organisasinya di dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah berdasarkan kendali dan sistem yang dibuat di dalam organisasi jawara. Fenomena ini tidak ubahnya sebuah panggung pemerintahan di atas pemerintahan lain, yang pada akhirnya lebih berorientasi pada kepentingan pribadi dan kelompoknya daripada kepada masyarakat luas.

Pengamatan di atas, sejalan dengan temuan penelitian Syarief Hidayat⁵. Dia menunjukkan adanya tiga bentuk kepentingan elit lokal yang mewarnai daerah yaitu 1). Kepentingan ekonomi (*seeking economics ends*) 2). Kepentingan untuk mengembangkan karier (*career advancement*) 3).Kepentingan untuk mengembangkan sponsor politik (*Political sponsorship*).

Ada kecenderungan semakin menguatnya elitisme lokal dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia, setelah diterbitkannya UU no 22 tahun 1999⁶. Munculnya elitisme lokal akan mewarnai pasang surutnya kehidupan demokrasi di Indonesia. Kehadirannya bisa menjadi hiasan bahkan ancaman bagi proses demokratisasi. Hal ini tentu saja dapat berimplikasi terhadap hasil produk sebuah penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kehadiran elit Jawa yang telah terintegrasi ke dalam pemerintahan daerah dikhawatirkan menghasilkan pemerintahan yang kurang produktif dan mandiri. Penelitian tim GAS (*Governance Association Survey*) tahun 2006 yang lalu⁷, menilai kinerja pemerintahan propinsi Banten masih buruk, ketika diukur dengan indikator-indikator 1) Pelayanan publik, 2) Perangkat hukum untuk iklim investasi, dan 3) Penegakan hukum. Korupsi masih tetap merebak di lembaga-lembaga yang seharusnya menjadi penyangga tegaknya hukum serta masih banyak hal lain yang melingkupi dinamika persoalan tata pemerintahan di bumi seribu pesantren ini. Kehadiran Banten sebagai propinsi baru diliputi ketidaksiapan para *stakeholder* dalam menyediakan sumber daya manusia bermutu. Kondisi ini berimplikasi pada kurangnya komitmen para penyelenggara pemerintahan dalam menjalankan tugasnya.

Demikian pula yang terjadi di Banten. Kelompok jawara bekerja melalui institusi kekuasaan, dengan posisi yang sangat strategis dalam proses komunikasi politik yang ditentukan oleh matrik dan konstelasi elit yang memberikan adanya basis institusi kekuasaan non formal menjadi dominan di dalam negara (pemerintahan daerah).

⁵ Syarief Hidayat "Pola Hubungan Penguasa dan Pengusaha di Tingkat Local" Sebuah Refleksi, Renai, Jurnal Penelitian ilmu Sosial dan Humaniora, (Pustaka Percik, tahun 1 no 1 Oktober 2000-Maret 2001), hal 113-114.

⁶ Lihat hasil penelitian Indonesia Rapid Desentralization Appraisal (IRDA) tahun 2001-2003 yang disponsori oleh The Asian Pondation mengenai pengelolaan pemda di berbagai kota dan kab; Indonesia menunjukkan bahwa pelaksanaan Good Governance sejak diterbitkannya UU no 22 tahun1999 menemukan hambatan strukturalisasi dan kulturisasi.

⁷ Hasil analisis akhir yang dikemukakan oleh tim GAS untuk mengukur kinerja pemerintahan Banten tidak terlepas dari realitas keterlibatan peran jawara dan mekanisme yang digunakannya dalam mengelola pemerintahan daerah setelah Banten menjadi propinsi sendiri. Untuk lebih detail lihat di 'penelitian GAS tahun2006"*KinerjaTatapemerintahanBanten*" dalam <http://www.kemitraan.or.id/data/events/2007.01.governance-assessment/06-profil-ga-banten.pdf>.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, perubahan terminologi makna dan bentuk sosial Jawara yang dikemukakan oleh beberapa peneliti sebelumnya antara lain Jawara disebut sebagai bandit atau penjahat, jawara adalah santri kiayi yang mempunyai ilmu silat dan magis, namun demikian realitasnya telah menjadi orang-orang penting di daerah dan menguasai politik lokal Banten. Yang menarik dari fenomena di atas adalah bahwa Jawara telah mengalami evolusi sosial.

Peristiwa evolusi Jawara menggambarkan serangkaian proses sejarah yang panjang untuk melakukan perubahan dan perkembangan tersebut. Oleh karenanya menarik untuk dikaji tentang bagaimana proses perkembangan evolusi Jawara itu berlangsung dan apa yang menggerakkan Jawara itu berevolusi hingga menjadi pejabat dan orang-orang penting di daerah. Oleh karenanya dalam penelitian ini hendak menjawab sebuah rumusan masalah sebagai berikut “*Bagaimana Jawara Berevolusi dari Bandit Menjadi Pejabat di daerah dan mengendalikan Pemerintahan Banten*“ ?

Tinjauan Pustaka

Dalam rangka mengelaborasi secara konseptual pemikiran mengenai bagaimana Jawara berevolusi dari organisme tingkat rendah yakni sebagai bandit hingga menjadi makhluk organisme tingkat tinggi yaitu pejabat dan orang-orang penting di daerah yang dapat berintegrasi dan mengendalikan pemerintahan daerah Banten, penelitian ini akan dikerangkai menjadi dua *frame*. Pertama adalah kerangka konsep tentang evolusi sosial dan kedua adalah konsep evolusi Jawara. Dalam konsep evolusi sosial dijelaskan adanya penggerak perubahan. Dalam sebuah perubahan sosial dapat terjadi karena adanya faktor-faktor yang mendukung mengapa perubahan tersebut bisa terjadi. Dalam hal ini faktor perubahan tersebut karena adanya daya upaya atau kemampuan aktor dan kedua adanya perubahan struktural seperti perubahan kondisi lingkungan dan lain sebagainya yang bersifat eksternal, perubahan struktur ini bisa menjadi penunjang maupun penghambat perubahan tergantung dari bagaimana kekuatan tawar menawar atau mobilitas yang dilakukan aktor. Relasi kedua faktor yang menggerakkan perubahan tersebut membingkai konsep pemikiran serta mengkonstruksi secara timbal balik adanya sebuah pemerintah bayangan (*shadow state*) yang terjadi di Propinsi Banten.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan historis deskriptif yakni mempelajari gejala sosial yang berlangsung sejak masa lalu hingga sekarang dengan menggali fenomena yang ditemukan di masyarakat. Prosesnya dilakukan dengan menggali sebanyak-banyaknya informasi yang dianggap kompeten dengan masalah yang diteliti. Dengan pendekatan ini pula dimaksudkan untuk mengukur secara cermat terhadap fenomena sosial tertentu yang berlangsung dalam kurun waktu masa lalu hingga masa kini, dan yang dilakukan peneliti adalah mengembangkan konsep dan menghimpun fakta tetapi tidak melakukan pengujian hipotesis.

Teknik pengambilan data dalam penelitian ini meliputi pengambilan data dokumentasi, *interview* dengan para nara sumber dan aktor yang sudah ditentukan

sebelumnya. Ketiga adalah pengambilan data dengan studi pustaka yang berasal dari berbagai literatur seperti atikel, penelitian sebelumnya dan lain-lain. Dari data yang sudah didapatkan, selanjutnya dilakukan analisis data yakni dengan dipilah dan dipilih untuk mencari data yang relevan sesuai dengan tujuan penelitian, data dokumenter dikombinasikan dengan data hasil wawancara. Strategi untuk menganalisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. Tahap pengumpulan dan pengecekan seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber. Setelah data diperoleh lalu dilakukan pengecekan satu sama lain dan dicek dengan data-data dari berbagai hasil dan sumber yang akurat.
- b. Tahap pengkategorisasian dan pengklasifikasian, dalam hal data yang sudah dicek, kemudian diklasifikasikan dan dikategorisasikan menurut urutan pembahasan dalam penelitian. Dalam hal ini dilakukan uji validitas dan reabilitas data, dengan cara melakukan kritik eksternal (sumber yang digunakan untuk membuat dokumen) dan kritik internal (isi dokumen) terhadap dokumen yang dimiliki.
- c. Tahap interpretasi dan penafsiran data, pada tahap ini dilakukan penafsiran atau pemberian makna yang signifikan terhadap data yang diklasifikasikan dan dicari hubungan satu dengan yang lainnya dan mengkaitkan teori penelitian sehingga pada akhirnya dapat menjawab pertanyaan penelitian.
- d. Menarik kesimpulan atas data yang telah dianalisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam rangka menjawab penelitian ini Jawara terlebih dahulu harus dipahami mengenai siapa itu Jawara, karena pengertian Jawara masa lalu dengan sekarang jelas berbeda, tetapi warisan Jawara di masa lalu seperti keberaniannya, kekerasannya masih tetap melekat dalam diri setiap Jawara sekarang ini. Jawara kini telah bermetamorfosis dalam berbagai profesi antara lain mereka telah menjadi pengusaha-pengusaha besar di daerah maupun di luar daerah, menjadi akademisi, birokrat, dan bahkan ada yang tetap menjadi Jawara tulen. Perubahan bentuk ini tidak terlepas dari pengaruh iklim globalisasi yang mengharuskan manusia berkompetisi dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya yang semakin kompleks.

Di samping memahami identitas Jawara, juga perlu mengenal lebih jauh organisasi yang melahirkan para Jawara. Hal ini penting, sebab Jawara selama ini tumbuh dan berkembang melalui serangkaian proses kehidupan dari organisasi yang dijalaninya. Organisasi yang dimaksud ini adalah organisasi persilatan tempat mereka menimba ilmu, berkumpul dan bermusyawarah. Di antara organisasi persilatan Jawara yang terkenal di Banten adalah Terumbu, TTKKDH, dan juga P3SBBI (persatuan pendekar persilatan dan seni budaya Banten) sebagai pusat komando bagi organisasi-organisasi persilatan lainnya. Organisasi ini cukup besar karena sejak tahun 1974 dipimpin oleh H. Hasan Sohib seorang sesepuh Jawara yang sangat dikenal dan dihormati di masyarakat Banten.

Selanjutnya interaksi antara Jawara dengan organisasi yang telah disebutkan di atas mempunyai keterikatan yang sangat kuat, karena setiap orang yang disebut Jawara adalah mereka yang pernah menimba ilmu di organisasi-organisasi tersebut. Artinya ketika seseorang yang mempelajari ilmu silat di perguruan tertentu, secara tidak langsung mereka telah terikat dengan pertalian yang erat, baik dalam kekeluargaan, kekerabatan, dan

pertemanan⁸. Meskipun Jawara memiliki profesi di bidangnya masing-masing, dapat ditengarai bahwa hubungan pertalian mereka dengan organisasinya sangatlah kuat seperti hubungan seorang anak dengan orang tuanya. Sehingga dapat dikatakan bahwa suatu organisasi persilatan menjadi besar tidak lepas dari dukungan anggotanya, dan begitupun sebaliknya bahwa seorang individu Jawara bisa membawa organisasinya untuk memenuhi kepentingan dan menggoalkan tujuannya.

Kedua, untuk bisa mengelaborasi lebih dalam bagaimana Jawara berevolusi, pada penelitian ini perlu dijelaskan mengenai periodisasi perkembangan dan perubahan Jawara yang dahulu merupakan seorang bandit, kini mereka berhasil menjadi pejabat dan orang-orang penting di daerah. *Pertama* adalah periodisasi sebelum kemerdekaan sampai menjelang Era reformasi tahun 1998. Pada periode ini Jawara dikenal sebagai seorang bandit. Hal ini diungkapkan oleh Sartono Kartodirjo dalam disertasinya mengenai Pemberontakan Petani Banten tahun 1888. Dalam disertasinya tersebut gerakan petani Banten tidak terlepas dari peranan para Jawara di dalamnya, sebab Jawara pada mulanya adalah seorang santri murid dari kiayi yang memiliki bakat di dalam ilmu kanuragan, silat, magis dan lain lain. Mereka berjuang bersama-sama dengan kiayi dalam melawan penjajah di Banten. Namun demikian ketika kesultanan Banten dihapus oleh Deandels, keadaan daerah Banten menjadi kacau dan tatanan sosial menjadi ambruk. Pada situasi ini muncul para pemimpin dari kalangan kiayi dan elit pedesaan lainnya. Mereka secara radikal membangkitkan semangat perlawanan. Pada situasi yang kacau ini muncul perampokan, penyamunan, pembegalan dan perbuatan di luar hukum lainnya. Tidak jarang di antara mereka ada yang tergolong orang kaya atau kelompok bangsawan lama yang kehilangan haknya atas tanah, lalu menempuh jalur di luar hukum untuk mengambil haknya. Dalam situasi ini mereka seringkali terpaksa bekerja sama dengan bandit-bandit dan perampok-perampok sesungguhnya. Oleh karena itu perlawanan dilakukan secara terbuka, sehingga seringkali mereka mendapat simpati dari rakyat. Hal inilah yang dimanfaatkan oleh pemerintah kolonial untuk meruntuhkan citra para pejuang yang sesungguhnya dengan mencap bahwa semua Jawara adalah bandit karena mereka ikut melakukan tindakan di luar hukum bersama para perampok sesungguhnya yang pada saat perlawanan petani di Cilegon tersebut dianggap sebagai keonaran dan pemberontakan. Inilah salah satu yang mendasari Jawara dianggap sebagai bandit sosial.

Ketika tidak ada lagi kolonialisme di tanah air peran Jawara bergeser menjadi pemimpin dalam masyarakat sosial. Kekayaan yang mereka miliki seperti sumber ekonomi dan magis yang diperoleh dari kiayi merupakan faktor utama yang menyebabkan Jawara dapat bertahan hidup dan melakukan metamorfosa fostural mereka dari tentara 'fisik' hingga menjadi pemimpin sosial politik mulai dari wilayah yang paling kecil seperti menjadi lurah di sebuah desa, penjaga keamanan desa serta guru ilmu silat dan ilmu magis. Meskipun terjadinya pergeseran peran namun kebanditan Jawara masih tetap melekat seperti penggunaan kekerasan yang selalu dilakukan untuk mendapatkan keinginan dan kekuasaan. Inilah kemudian membuat stigma negatif masyarakat dalam memandang Jawara. Pandangan negatif terhadap Jawara ini terbawa hingga masa era Orde Baru.

Banten yang dikenal sebagai masyarakat religius karena basis Islam yang kuat sejak pemerintahan Sultan Maulana Hasanudin, akan sangat sulit diruntuhkan oleh kekuatan apapun bahkan kolonialisme sendiri. Namun demikian ketika rezim Orde Baru yang merupakan koalisi Suharto, ABRI dan teknokrat melihat Islam sebagai entitas menjadi

⁸ Dalam setiap organisasi persilatan di Banten terdapat aturan dan sumpah setia yang harus dilaksanakan oleh seseorang yang bergabung dengan perguruan silat tersebut. Peraturan dan sumpah ini dipercaya untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan tidak melenceng dari syariat

ancaman bagi sistem, rezim ORBA mempergunakan Golkar dan birokrasinya sebagai mesin pengumpul suara demi mempertahankan dominasi kekuatan politiknya. Di daerah Golkar mengambil massa subkultural masyarakat seperti Jawa untuk dijadikan mesin kerja Orde Baru dalam menguasai politik daerah.

Ketika rezim ORBA memberlakukan kebijakan yang meminggirkan Islam politik meminjam istilah Rusli Karim (1999) sebagai depolitisasi Islam⁹. yaitu islam sedapat mungkin dijauhkan dari politik, sehingga kekuatan dan pengaruh ideologis yang dibawanya tidak akan menemukan formulasi berkembang dan lebih memberikan keleluasaan bagi berkembangnya Islam kultural. Maka melalui kebijakan ini posisi kiayi di Banten pada saat itu dianggap sebagai entitas penting golongan Islam, namun pada masa Orde Baru mengalami peminggiran, sehingga yang memperoleh penguatan oleh sistem Orde Baru adalah Jawa.

Pengejahwantahan Orde baru syarat kepentingan untuk menempatkan Jawa dalam mengamankan kehidupan politik Banten. Dalam dimensinya kelompok Jawa yang pragmatis memiliki karakteristik yang lebih dikehendaki pemerintah dibanding ulama atau kiayi. Sebagai konsekuensinya kalangan Jawa berhasil terkooperasi dan banyak dari mereka yang kemudian menjadi kader Golkar yang berperan sebagai mesin memobilisir massa. Kedekatan Jawa dengan partai Golkar yang semakin *intens* menyebabkan kelompok Jawa pada akhirnya menikmati *privilege* politik yang menguntungkan yakni pewarisan hegemoni kekuasaan partai Golkar dan menciptakan jaringan kekuasaan terhadap berbagai macam kelompok terutama di jajaran birokrat dan kemampuan berpolitik praktis, sementara itu kedekatan dengan kelompok penguasa telah menyebabkan kelompok Jawa ini mendapatkan banyak kemudahan dan fasilitas untuk membangun ekonominya. Banyak di antara perusahaan di Banten dan di luar Banten yang saat ini dikelola oleh kelompok ini, baik yang dimiliki secara langsung maupun tidak, dan pucaknya adalah dikuasainya badan-badan ekonomi nasional di tingkat lokal ke tangan kelompok Jawa seperti Kadin, Gapensi dan HIPMI. Penguasaan sumber ekonomi ini pada gilirannya akan turut memperkuat legitimasi kelompok ini di hadapan banyak pihak, sekaligus merupakan media yang mempengaruhi keputusan pemerintah dalam bidang usaha dan perekonomian Banten.

Dengan bermodalkan tiga legitimasi peninggalan Orde Baru tersebut, kelompok Jawa kemudian memasuki Era Reformasi tahun 1998 hingga tahun 2010 sekarang ini. Di era reformasi yang melahirkan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah menjadi peluang baru bagi masyarakat Banten untuk merealisasikan keinginan yang lama terpendam sejak tahun 1953 yakni mewujudkan pemisahan Banten dari Jawa Barat dan menjadi provinsi mandiri. Dan akhirnya Banten resmi menjadi provinsi pada tanggal 18 Oktober 2000. Kelahiran Banten ini tidak terlepas dari peranan para kelompok Jawa. Sebab peranan mereka begitu besar dalam mengawal dan mensukseskan perjuangan ini bersama-sama dengan para tokoh masyarakat, ulama dan rakyat Banten.

Setelah Banten menjadi provinsi, maka peluang Jawa untuk memasuki ranah pemerintahan daerah menjadi semakin terbuka. Melalui legitimasi dan kepercayaan dari masyarakat Banten atas peranannya dalam menggoalkan Banten menjadi provinsi serta didukung oleh kemampuannya dalam berinteraksi politik maka Jawa dapat dengan mudah memasuki ranah pemerintahan daerah seperti menjadi pegawai negeri sipil (PNS), anggota DPRD dan bahkan di tahun 2001 Jawa berhasil menempatkan Rt. Atut Chosiah sebagai wakil Gubernur. Di tahun 2006 *incumbent* wakil gubernur ini mampu mengalahkan lawannya

⁹ baca Rusli Karim, Negara dan Peminggiran Islam Politik (Tiara wacana, Yogyakarta 1999) dan Bahtiar Effendi, Islam dan Negara Transformasi Pemikiran dan Praktek Politik Islam di Indoensia, (Paramadina, Jakarta, 1998).

hingga berhasil menduduki orang nomor satu di Banten dengan menjadi Gubernur Banten periode 2006 - 2011.

Sejalan dengan keberhasilan Jawara yang telah bermetamorfosis menjadi orang-orang penting di daerah. Pergeseran politik nasional yang ditandai dengan lahirnya era reformasi berdampak pula pada perubahan peran-peran tradisional dan aktivitas sosial Jawara yang dahulu masih dijalani. Demikian pula dengan perubahan sosial politik lokal masyarakat Banten yang secara tidak langsung telah membawa persepsi perubahan masyarakat dalam memandang Jawara. Misalnya sebagian masyarakat menginginkan istilah Jawara dihilangkan, dengan harapan dapat menjauhkan citra budaya kekerasan di Banten. Namun tampaknya budaya kekerasan yang selalu digunakan Jawara tidak akan pernah hilang sejalan dengan perkembangan zaman.

Sebelum menentukan faktor apa saja yang menjadi penggerak evolusi jawara, perlu menganalisis model bekerjanya Jawara masa lalu menjadi Jawara masa kini, sebab dari sinilah faktor-faktor penggerak evolusi tersebut akan dengan mudah ditemukan. Analisis model bekerjanya Jawara ini merupakan hasil dari analisis spektrum nilai-nilai jawara dahulu yang masih melekat dan yang sudah ditinggalkan. Diantara nilai-nilai yang masing melekat tersebut antara lain nilai spiritualitas keagamaan, kebanditan dengan 'centeng', ilmu silat, individualistik, dan keterikatan organisasi yang kuat. Sedangkan nilai yang ditinggalkan adalah sifat dan perilaku sombong, sompral, bandit 'perampok', ilmu magis, peranan politik mengganti kiayi. Oleh karena itu model bekerjanya Jawara dapat dijelaskan di bawah ini:

1. Jawara dari santri menjadi belum tentu santri

Dahulu jawara adalah santri murid kiayi yang dididik dan diberi ilmu agama dan ilmu magis di pesantren, yang diharapkan sebagai alat pertahanan diri dari serangan musuh dan kolonialisme. Seiring dengan tidak adanya penjajah maka ilmu kanuragan dan magis tidak sembarangan orang bisa memilikinya kecuali seijin gurunya, karena perilaku manusia sekarang ini jauh dari nilai-nilai agama. ditambah perubahan kehidupan yang semakin modern, arus liberalisasi dan kapitalisme semakin menggerogoti hati nurani manusia, sehingga tidak sedikit para Jawara menggunakan cara-cara kebebasan seperti penggunaan kekerasan dan jauh dari agama. Inilah yang mengindikasikan bahwa Jawara kini tidak lagi seorang santri.

2. Dari Bandit menjadi Pejabat

Perubahan identitas ini terjadi tidak lain karena adanya perjuangan dan daya upaya aktor yang terus dilakukan untuk memperbaiki kehidupannya yang lebih baik. Proses perubahan ini membutuhkan periodisasi waktu yang lama, serta momentum peluang yang tepat untuk berintegrasi menuju posisi dan kedudukan yang lebih tinggi. Momentum yang tepat tersebut adalah saat pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang oleh Jawara dimanfaatkan untuk menggoalkan Banten menjadi propinsi dan Jawara berperan penting di dalamnya, sehingga mereka mudah memasuki pemerintahan dan memberi peluang untuk menjadi pejabat daerah.

3. Dari pasukan melawan penjajah menjadi pasukan pengaman daerah

Sejak dahulu kehadiran Jawara telah dipersiapkan oleh kiayi untuk berjuang bersama-sama melawan kolonialisme. Kelompok Jawara selalu bersiap siaga menjaga keutuhan dan keamanan daerah. Hal ini dilakukan karena Jawara pada saat itu dipercaya oleh masyarakat sebagai orang yang memiliki silat, magis sehingga mampu melindungi masyarakat Banten. Namun seiring dengan perubahan jaman, peranan Jawara telah beralih sebagai pasukan

pengaman daerah yang otonom yang biasanya diintruksikan oleh organisasi P3SBBI pimpinan H. Hasan Sohib. Pasukan ini terlihat ketika terdapat momen-momen penting daerah seperti penyelenggaraan pemilu, pilkada, gubernur, bupati, bahkan pemilihan lurah, kepala desa dan lain sebagainya.

Dari analisis penggerak perubahan dan cara bekerjanya Jawara untuk bisa berevolusi, maka dapat ditentukan bahwa Jawara melakukan perubahan evolusi melalui dua faktor. Pertama adalah cara kerja yang dilakukan oleh pelaku perubahan sebagai perubahan aktor. Kedua adalah faktor pengaruh perubahan struktural yang meliputi pergeseran dan perubahan iklim politik nasional dan lokal Banten sendiri.

A. Daya upaya aktor dalam *daily life politics*

Kemampuan aktor ini diwujudkan dalam berbagai hal antara lain

1. Mengakselerasi Manajemen Jaringan antar Jawara.

Dalam membangun hubungan antar para Jawara memiliki jaringan yang khas, ini ditunjukkan dengan cara membangun hubungan emosional di antara sesama Jawara, seperti hubungan kekerabatan, seguru seilmu, pertemanan dan lain sebagainya. Dalam hal kekerabatan apabila diantara kerabatnya ada yang disakiti, dihina oleh orang lain, maka Jawara akan membela sepenuhnya. Setelah kerabat atau keluarga sebagai prioritas utama yang harus dibela, kedua adalah seguru seilmu, dimana Jawara tersebut menimba ilmu dalam satu organisasi. Ketiga adalah ikatan perhimpunan organisasi para Jawara, biasanya mereka yang tergabung dalam organisasi P3SBBI (Persatuan Pencak Silat dan Seni Budaya Banten).

2. Mengakselerasi *Training* Jaringan Organisasi

Organisasi persilatan Jawara tidak hanya berada di Banten, namun berkembang di seluruh wilayah Indonesia seperti di Sumatra, Kalimantan, Jawa Tengah, Jawa Timur bahkan sampai ke manca negara seperti Singapura, Prancis dan lainnya. Hal ini disebabkan karena kemampuan mereka dalam mengelola dan membangun organisasi yang cukup baik. Mulai dari mengelola keuangan, membuat struktur organisasi dan aturan-aturannya, memberikan kartu anggota, mengadakan perkumpulan dan diskusi serta bentuk kegiatan lainnya. Disamping itu, organisasi mereka membukakan diri untuk menerima *training* mengajarkan silat kepada masyarakat di luar daerah Banten bahkan terbuka bagi orang asing yang berniat mempelajari seni budaya Banten.

3. Mengakselerasi dalam kompetisi individu

Para Jawara yang menyanggah profesi lebih tinggi seperti pejabat, pengusaha, birokrat, akademisi adalah semata-mata karena produktivitas hidup dan daya upaya yang dilakukan untuk merubah nasib, memenuhi kebutuhan hidup yang serba kompleks. Oleh karenanya kehidupan mereka tidak hanya mengandalkan kemampuan silat saja, tetapi perlu adanya usaha dan kompetisi untuk merubah keadaan. Para Jawara yang mempunyai modal ekonomi, bisnis cukup baik adalah yang paling unggul dalam melakukan kompetisi hidup, sebab mereka akan lebih mudah mengakses kekuasaan baik di pemerintahan maupun di masyarakat disamping itu tentu karena hasil kerja keras dalam membangun jaringan dan kerjasama bisnis, sehingga menjadi pengusaha yang sukses.

4. Kemampuan dalam berpegang teguh pada budaya dan kepercayaan

Pandangan kepercayaan dan budaya masyarakat Banten dibentuk melalui perjalanan sejarah perjuangan para ulama di Banten sebelum kemerdekaan. Para ulama sangat berjasa dalam melawan kolonialis, bahkan masyarakat Banten menganggap kepemimpinan harus dipegang oleh ulama dan Jawara, jika ulama atau kiayi tidak eksis lagi, maka Jawara berkewajiban untuk menggantikan posisi kiayi tersebut. Para Jawara mempercayai dan meyakini bahwa kepemimpinan kiayi adalah representasi kepemimpinan para nabi yang dapat memperbaiki masyarakat dari kejahatan dan keburukan menuju masyarakat madani seperti yang dilakukan pada masa Rasulullah SAW. Kepercayaan dan keyakinan ini menjadi landasan berpijak kelompok Jawara dalam menilai dan menimbang masalah kehidupan baik yang ada di internal lingkungan masyarakat maupun dalam urusan di pemerintahan.

5. Kemampuan dalam mendayagunakan kekerasan

Pendayagunaan kekerasan biasanya dilakukan untuk mendapatkan kekuasaan, logika ini dapat diterima, sebab umumnya logika kekuasaan secara naluri berusaha memenangkan si pemilik kuasa tersebut. Kekerasan pada Jawara bersumber pada perilaku sejarah masa lalu sebagai bandit sosial. Dengan dibekali ilmu kanuragan dan magis secara tidak langsung membentuk pribadi Jawara yang kuat, tegas, bertenaga dan kasar, sehingga ia sering melakukan tindakan kasar dan kekerasan sekalipun.

Disamping itu, kekerasan yang terdapat pada Jawara tidak akan tercipta kembali jika tanpa dukungan militer. Militer sebagai penguasa yang mempunyai otoritas kekerasan sejak dahulu yang dikenal telah *membakup* beberapa kelompok masyarakat di daerah sebagai penyalur kekuasaan yang dianggap berpotensi melakukan sistem kerja militer, sebab militer merupakan alat yang ampuh untuk menunggangkan kekuasaan rezim Orde Baru. Di Banten hal ini ditunjukkan pada tahun 1967 militer dan TNI sudah bermain penting dalam pengadaan proyek bersama para pengusaha termasuk H. Hasan Sohib (sesepuh Jawara) yang berusaha mengadakan logistik di Jawa Barat, Banten dan Lampung dengan Bantuan pengamanan dari TNI. Atas jasa inilah kemudian TNI atau militer dipercaya untuk memimpin organisasi persilatan seperti yang dilakukan oleh TTKKDH dan P3SBBI sebagai upaya untuk mengkaderisasi, melatih, mengorganisir organisasinya agar para anggotanya bermental baja dan tangguh dalam berperan sebagai pasukan pengamanan daerah. Namun demikian ketika para Jawara sudah mampu untuk mandiri, maka kepemimpinan TNI diganti dengan pengusaha dengan harapan kepemimpinan pengusaha dapat memberikan kontribusi dana untuk pengembangan kader dan organisasinya di masa mendatang.

B. Faktor Kesempatan untuk Berubah (Struktural)

Selain berkemampuan dalam *daily life politics*, kelompok Jawara mampu dalam menggunakan peluang. Peluang ini merupakan kesempatan besar bagi Jawara untuk melakukan evolusi yang lebih tinggi. Peluang tersebut datang karena adanya berbagai perubahan struktural baik pergeseran politik di tingkat nasional maupun perubahan politik lokal. Perubahan politik ditingkat nasional melahirkan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, sedangkan perubahan ditingkat lokal melahirkan banyak daerah yang menginginkan independen. Salah satunya adalah Banten.

Peluang ini dimanfaatkan oleh Jawara untuk menggoalkan propinsi Banten, dan Jawara bermain penting di dalamnya. Berkat peranan dan jasa inilah kelompok Jawara mudah mengakses kekuasaan baik di pemerintahan eksekutif, legislatif maupun di lingkungan masyarakat sendiri. Salah satu akses kekuasaan Jawara tersebut terwujud dalam keikutsertaan pengadaan proyek-proyek besar PEMDA dan andil dalam menentukan kebijakan pemerintahan. Akibatnya banyak kasus terjadi yang merugikan masyarakat kecil di Banten,

contohnya kasus tanah pemrov tahun 2003¹⁰, kapal infeksi dan nelayan 2003¹¹, pengadaan logistik pilkada Banten 2006¹². Meskipun pemerintahan banten penuh dengan masalah, kelompok Jawara seakan tidak merasa bersalah. Puncak akses kekuasaan tertinggi kelompok Jawara adalah menjadikan Rt. Atut Chosiyah yang diketahui sebagai anak dari sesepuh Jawara menjadi gubernur Banten.

Dalam penelitian ini menganalisis bahwa ketika kelompok Jawara yang disebut sebagai *informal government* telah memasuki dan menguasai ranah formal pemerintahan serta akses kekuasaan dapat dengan mudah didistribusikan baik kepada keluarga, sanak saudara, kerabat, teman, kelompok organisasinya. Maka pemerintahan Banten pantas digambarkan dengan pertunjukan lakon sebuah pemerintahan di atas pemerintahan atau disebut pemerintahan bayangan (*shadow state*). *Shadow state* menggambarkan bahwa pemerintahan formal tidak mampu dan berdaya dalam menyelenggarakan pemerintahan yang sesungguhnya.

SIMPULAN DAN SARAN

SIMPULAN

Dari beberapa uraian yang telah disebutkan dalam pembahasan dapat ditarik suatu benang merah dalam sebuah kesimpulan sebagai berikut:

1. Perjalanan atas proses perubahan dan evolusi Jawara di Banten terjadi melalui proses sejarah dalam ruang dan waktu yang sangat panjang, lambat dan gradual. Perjalanan evolusi tersebut dijelaskan melalui dua periodisasi waktu, *pertama* periodisasi perkembangan dan perubahan Jawara sebelum kemerdekaan hingga Orde Baru. Pada periodisasi ini tergambar dengan jelas tentang masa lalu Jawara yang buram dengan sebutan bandit sosial, kemudian merubah diri dengan menghapus *image* negatif Jawara dengan sebutan pendekar melalui pendirian organisasi P3SBBI (Persatuan Pendekar Persilatan dan Seni Budaya Banten), kemudian berupaya untuk berkiprah ke dunia politik dengan didukung Partai Golkar. *Kedua* evolusi sesudah memasuki era reformasi hingga saat ini. Dari periodisasi ini Jawara memiliki kemampuan mengelola peluang dan kesempatan dari momentum reformasi dan otonomi daerah untuk berperan lebih besar lagi dalam membangun Banten. Dengan berusaha *Merecall* masa lalunya yang negatif, Jawara merubah peran menjadi laskar pasukan pengaman daerah secara otonom, sehingga dengan kemampuannya tersebut, mereka dengan mudah memasuki ranah pemerintahan daerah menjadi pejabat dan mengatur politik local Banten.
2. Untuk mengupayakan terjadinya gerak perubahan dan *survival*, Jawara melakukan mobilisasi politik melalui dua cara. Pertama berpolitik secara formal atau langsung dan kedua berpolitik secara informal atau tidak langsung. Secara formal Jawara melakukan mobilisasi politik melalui Partai Golkar sebagai pintu masuk menuju kekuasaan. Dengan menjadi penjaga kepentingan Golkar dan Orde Baru, Jawara diuntungkan dalam memperoleh akses ekonomi, politik, budaya yang sangat besar. Ketika kesempatan perubahan itu datang, berbekal kemampuan yang dimiliki akhirnya mereka dapat menembus benteng kekuasaan terakhir dengan menjadi kepala daerah di Propinsi Banten. Sedangkan mobilisasi politik secara informal atau tidak

¹⁰ Baca Sinar harapan”Bermasalah tanah untuk pemrov dan Polda Banten”13 mei 2003

¹¹ Sinar harapan”banten beli kapal bekas untuk infeksi”februari 2003

¹² Harian Teras”Pilkada banten antara harapan dan Kenyataan” Nopember 2006

langsung dilakukan dengan membangun nilai-nilai dan prinsip-prinsip kehidupan di lingkungan organisasi kelompok Jawara. Nilai-nilai yang mereka pertahankan menjadi *informality government* yang kemudian dipenetrasikan demi mendapatkan legitimasi masyarakat dan kemudahan dalam mengakses kekuasaan di pemerintahan daerah. Disamping itu, mereka memberi identitas sebagai kelompok masyarakat oposisi yang dipercaya sebagai pengganti dari kepemimpinan ulama sejak dahulu, dan juga sebagai entitas kelompok masyarakat yang mengembangkan seni budaya persilatan sebagai warisan leluhur yang dimiliki Banten.

3. Dalam melakukan perubahan sosial Jawara dari seorang bandit hingga menjadi pejabat dan orang-orang penting daerah, membutuhkan evolusi proses yang tidak mudah. Ada dua faktor yang mendorong perubahan tersebut, *pertama* adalah faktor kemampuan atau strategi yang digunakan Jawara untuk dapat mempertahankan keberlangsungan hidup. Cara kerja ini dilakukan sejak dahulu secara terus menerus baik individual maupun kelompok yakni dengan melakukan akselerasi dalam membangun manajemen hubungan antar Jawara, akselerasi training organisasi, kompetisi individual dan mendayagunakan kekerasan. *Kedua*, adalah adanya faktor kesempatan atau celah yang memungkinkan Jawara untuk merubah diri menjadi makhluk organisme paling tinggi di masyarakat Banten. Hal ini ditandai dengan perubahan struktural yaitu adanya pergerseran politik nasional dan perkembangan politik di tingkat lokal yang dibarengi dengan pembentukan propinsi Banten. Dengan perubahan struktural ini secara tidak langsung telah merubah pandangan, orientasi hidup dan perilaku Jawara untuk memasuki peranan ke ranah yang lebih luas lagi yaitu di lingkungan pemerintahan daerah. Sehingga mereka dapat dengan mudah mengakses kekuasaan, dengan mencalonkan diri menjadi wakil Gubernur hingga akhirnya menjadi orang nomor satu (Gubernur) Banten.
4. Evolusi dari Bandit hingga menjadi pejabat di atas adalah hasil dari bekerjanya dua faktor tersebut, namun demikian kemampuan dan daya upaya aktor Jawara lah yang menjadi penentu evolusinya. Sehingga faktor perubahan struktural sebagai sebuah kesempatan hanyalah pendukung dari evolusi sosial. Interaksi kedua faktor tersebut membuahkan sebuah struktur pemerintahan bayangan atau *shadow state*.
5. *Shadow state* atau pemerintahan bayangan di Banten dalam studi ini merupakan bentuk bekerjanya institusi informal government Jawara yang telah terstruktur dalam pelaksanaan nilai-nilai pada kehidupan keseharian para Jawara. Dengan nilai-nilai ini melegitimasi kekuatan Jawara dalam melakukan kerja di institusi informal negara (pemerintahan daerah) sehingga institusi formal negara tidak berdaya dalam kemandiriannya.

SARAN

Dari hasil kajian evolusi jawara, penulis merekomendasikan hal-hal yang dapat dijadikan alternatif solusi maupun kritik bagi penelitian ini yaitu:

1. Kebijakan otonomi daerah yang berparadigma desentralisasi dan merupakan aplikasi ideologi liberalisme secara tidak langsung telah memberikan kesempatan kepada elit-elit di daerah untuk mendistribusikan kekuasaannya lebih luas lagi. Kesempatan emas ini pun dimanfaatkan Jawara dalam evolusinya untuk dapat menguasai semua elemen pemerintahan daerah dan politik lokal Banten. Oleh karenanya, ketika otoritas formal negara (pemerintahan daerah) sudah tidak berdaya lagi meruntuhkan kekuasaan Jawara yang melahirkan produk pemerintahan di atas pemerintahan lain (*shadow state*), maka diperlukan ruang ekspresi *civil society* seperti LSM dan NGO yang lebih 'kritis' sebagai salah satu syarat rasionalitas politik demokratisasi untuk mengontrol struktur pemerintahan

- yang dilakukan Jawara. Sehingga jendela untuk menyampaikan pendapat umum dan ruang kritis terbuka lebar tanpa diintimidasi oleh kekerasan Jawara.
2. Penelitian mengenai evolusi Jawara diakui belumlah sempurna, sebab data-data yang diperoleh hanya menginventarisir data-data di masa sekarang, tanpa mengindahkan data-data masa lalu yang langka, sehingga dimungkinkan hasilnya kurang memadai dan tidak cermat. Hal yang semestinya dilakukan dalam meneliti evolusi atau perubahan sosial biasanya dengan penelitian studi lapangan yang cukup lama dan memakan waktu yang cukup panjang, sehingga data dan hasil yang diperoleh akan lebih sempurna.
 3. Apa yang ditulis dalam penelitian mengenai bagaimana proses evolusi Jawara di Banten, ternyata masih menyisakan ruang kosong untuk ditelaah lebih mendalam lagi, bagi peneliti lainnya yang berkaitan dengan seluk beluk kehidupan Jawara yang belum tersentuh dalam penelitian ini. Harapan kedepannya semoga peneliti yang lainnya berminat terhadap hal yang sama untuk dapat menyempurnakan apa yang ditulis disini dan jika perlu ‘menjungkirbalikkan’ apa yang peneliti temukan dan yakini selama ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Bahtiar Effendi, 1998, *Islam dan Negara Transformasi Pemikiran dan Praktek Politik Islam di Indoensia*, Paramadina, Jakarta.
- Hudari, Atu Karomah, Sholahudin Al-Ayubi, 2004 ”*Tasbih dan Golok; Studi tentang Peran, Kedudukan dan Jaringan Kiai dan Jawara di Banten*”, Laporan Penelitian Kompetitif (IAIN Sultan Maulana Hasanudin, Serang).
- Rusli Karim, 1999, *Negara dan Peminggiran Islam Politik* Tiara wacana, Yogyakarta
- Sartono Kartodirjo, 1988, *Pemberontakan Petani Banten 1888*, Pustaka Jaya, Jakarta
- Syarief Hidayat ”*Pola Hubungan Penguasa dan Pengusaha di Tingkat Local*” Sebuah Refleksi, Renai, Jurnal Penelitian ilmu Sosial dan Humaniora, (Pustaka Percik, tahun 1 no 1 Oktober 2000-Maret 2001)
- Tihami 1992, “*Kiai dan Jawara di Banten*” Tesis Master, Universitas Indonesia, Jakarta
- Sinar harapan ”*Bermasalah Tanah untuk Pemrov dan Polda Banten*”13 Mei 2003
- Sinar harapan ”*Banten beli kapal bekas untuk insfeksi*”februari 2003
- Harian Teras ”*Pilkada Banten antara harapan dan Kenyataan*” Nopember 2006